



**Jurnal Kompetitif : Media Informasi Ekonomi Pembangunan,
Manajemen dan Akuntansi
Vol. 7 No. 1, Maret 2021 ISSN 2460-5298, Dan E-ISSN 2621-6620**

**ANALISIS KESERASIAN BELANJA MODAL DAN BELANJA OPERASIONAL
PADA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**Siti Sriningsih¹⁾
Bq. Ismiwati²⁾
Muhamad Sayuti³⁾**

**Universitas Mataram^{1)&2)}
Univesrsitas Islam Al-Azhar³⁾**

¹⁾Email: siti.sriningsih1206@gmail.com

²⁾Email: ismiwati2010@gmail.com

³⁾Email: sayuthi.say@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to see the compatibility of Capital Expenditures and Operational Expenditures in East Lombok Timur Finance. The type of research is quantitative descriptive research with the Conformity Ratio Analysis Method. The calculation of the ratio shows that it is quite good in terms of the compatibility of Capital Expenditures and the harmony of Operating Expenditures. The good balance shows that the East Lombok Regency Government is able to allocate its regional expenditure to increase development activities in order to achieve targeted growth.

Key words: Harmony, Capital Expenditures, Operational Expenditure

PENDAHULUAN

Desentralisasi Fiskal sebagai jalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, telah menarik perhatian para ahli seperti Qates (1993), Martnez dan McNab (2001), Bird (1993), mereka mengatakan dalam Khusaini dengan diserahkanya beberapa kewenangan ke

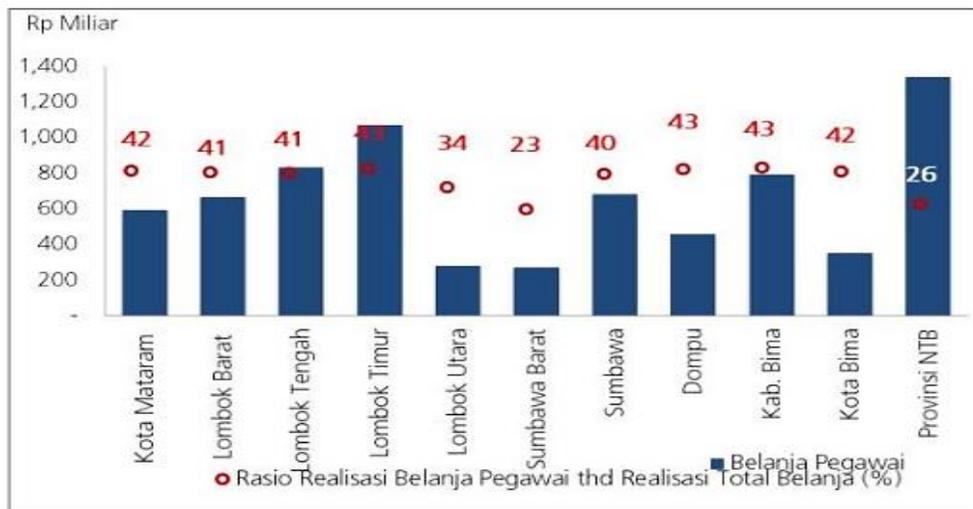
pemerintah daerah, diharapkan pelayanan masyarakat semakin efisien dan pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat lokal.

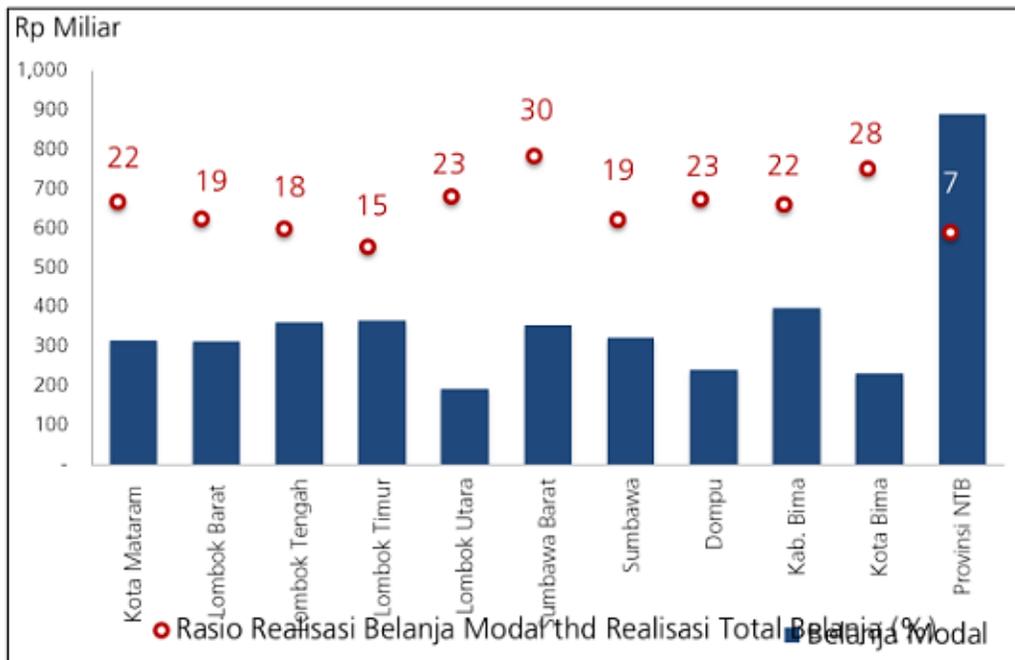
Secara intuitif, desentralisasi fiskal dapat mendorong efisiensi ekonomi dan secara dinamis akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Qates, 1993; Martinesz dan Macnab, 1997). Argumen yang mereka bangun adalah pengeluaran untuk infrastruktur dan sektoral akan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah, karena daerah mengetahui karakteristik daerahnya masing-masing. Jika merujuk dari argument yang dibangun maka pemerintah daerah dipercaya dapat mengalokasikan dana kepada setiap sektor ekonomi secara efisien.

Menurut world bank (1997) desentralisasi fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung, meningkatkan efisiensi ekonomi di sektor prngeluaran pemerintah. Efek dinamis tersebut yang mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga dikatakan terjadi hubungan yang positif antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi.

Desentralisasi fiskal diharapkan akan memberikan efek kepada pertumbuhan ekonomi setiap kabupaten di Indonesia. Khususnya di Kabupaten Lombok Timur yang memiliki potensi dari geografis daerah, sumberdaya alam yang berpotensi pertanian dan agroindustry, jumlah penduduk yang banyak, serta luas wilayah yang terluas dari kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat (NTB). Karena memiliki potensi sehingga dengan desentralisasi akan memberikan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, dengan di anggarkannya belanja pemerintah yaitu belanja modal. Adapun gambaran tentang besarnya belanja modal dan pegawai dapat dilihat pada grafik 1.1. Dimana Lombok Timur memiliki belanja modal yang terendah jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat'. Pada Grafik terlihat bahwa pada tahun 2018 rasio penyerapan belanja modal terhadap total belanja pemerintah provinsi NTB, Kabupaten Lombok Timur merupakan kabupaten dengan belanja modal terendah di antara kota/kabupaten lain di provinsi NTB dengan rasio sebesar 14,74%. Sedangkan dari sisi rasio penyerapan belanja pegawai terhadap penyerapan total belanja.

Grafik 1.1 menunjukkan posisi Kabupaten Lombok Timur berdasarkan besarnya belanja modal dan belanja pegawai terhadap total belanja pemerintah Provinsi NTB tahun 2018.





Sumber:www.bi.go.id (2018)

, Kabupaten Lombok Timur merupakan yang tertinggi dengan angka rasio sebesar 43,23%. Berdasarkan persebaran belanja modal dan belanja pegawai pada grafik dan teori yang telah di jelaskan sebelumnya sehingga tertarik untuk mengkaji mengenai keserasian belnja modal dan belanja operasi dalam keuangan darah Kabupaten Lombok Timur.

TINJAUAN PUSTAKA

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup waktu selama satu tahun. Anggaran ini merupakan perencanaan jangka pendek sebagai program ke dalam rencana keuangan tahunan yang lebih kongkrit. Anggaran daerah dikenal dengan istilah Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya selama satu tahun (Mahsun,2006).

Setelah adanya kebijakan otonomi terkait dengan keuangan daerah dalam pelayanan publik dituntut untuk transfaran dalam penggunaan anggaran. Bentuk dari pelaksanaan

otonomi daerah adalah di berlakukannya desentralisasi fiskal. Implikasi ekonomi dari desentralisasi adalah program-program dalam pembangunan pemerintah bidang ekonomi lebih diarahkan pada kepentingan lokal dan disesuaikan pada lingkungan daerah setempat (khusaini,2006).

Pengeluaran yang terkait dengan keuangan daerah adalah belanja daerah yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pelaksanaan otonomi daerah menuntun untuk alokasi anggaran khususnya terkait anggaran publik seperti belanja modal yang sifatnya untuk pembangunan dan investasi dapat mencerminkan *local demand* dan *public oriented* .

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur atau komponen APBD sebagai berikut.

1. Pendapatan daerah Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 22 ayat (1) huruf a, “Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah”. Pendapatan daerah dikelompokkan atas:
 - a. Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat (18) menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.
 - b. Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 19, “Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus”.

- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat (UU Nomor 33 tahun 2004 pasal 43).
2. Berdasarkan UU Nomor 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 14, “Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”.

Struktur belanja daerah berdasarkan kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung adalah merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung terdiri dari:

- a. belanja pegawai
- b. belanja bunga
- c. belanja subsidi
- d. belanja hibah
- e. belanja bantuan sosial
- f. belanja bagi hasil kepada prov/kab/kota dan pemdes
- g. belanja tidak terduga

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Kelompok belanja langsung terdiri dari:

- a. belanja pegawai
 - b. belanja barang dan jasa
 - c. belanja modal
3. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 15 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, “Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya”.

Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA).

- b. Pencairan dana cadangan.
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari:

- a. Pembentukan dana cadangan.
- b. Penyertaan modal.
- c. Pembayaran pokok utang.
- d. Pemberian pinjaman daerah.
- e. Pembayaran kegiatan lanjutan.
- f. Pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

Belanja Operasi

Belanja Operasi Dilansir dari buku Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua (2015) karya Erlina, Omar Sakti, dan Rasdianto, belanja operasi adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri atas empat belanja yaitu: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial.

Belanja Modal

Belanja modal adalah jenis pengeluaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal terdiri atas belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan aset tidak berwujud,

Rasio Kesenjangan

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim, 2007). Ada 2 perhitungan dalam rasio keserasian ini, yaitu : rasio belanja operasi dan rasio belanja modal.

Rasio belanja operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah (Mahmudi, 2010).

Rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20% (Mahmudi, 2010).

Musgrave (1993), menjelaskan bahwa perubahan pada struktur pengeluaran yang besar terjadi pada pengeluaran kesejahteraan sosial seperti dalam bentuk jaminan sosial, porsi pada pendidikan tetap, namun porsi mobilisasi untuk transportasi meningkat sehingga berdampak pada kenaikan kebutuhan jalan raya. Namun tidak bertahan lama karena porsi pengeluaran akan kebutuhan jalan raya menjadi menurun pada tahun berikutnya. Sehingga bias dikatakan bahwa perubahan yang terjadi pada struktur pengeluaran karena adanya perubahan pada pengeluaran lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdal dkk (2018) yang berjudul analisis keserasian belanja daerah Kabupaten Garut disimpulkan bahwa keserasian belanja Pemerintah Kabupaten Garut dilihat dari rasio belanja operasional terhadap total belanja pemerintah dinilai *Fluktuatif*, dengan presentase sekitar 72,67% sampai 80,52%, sedangkan nilai rata-rata presentase adalah 77,59%. Terdapat kenaikan pada tahun 2013-2015 yang dikarenakan adanya dana yang ditempatkan sebagai belanja pegawai. Hasil rasio belanja modal terhadap total belanja Pemerintah Kabupaten Garut tahun anggaran 2013-2017 menunjukkan adanya keserasian antara belanja pemerintah daerah, yaitu pada belanja modal yang dilakukan pemerintah. Hal tersebut memiliki nilai rata-rata sebesar 16,20%. Sedangkan belanja modal

dinilai *Fluktuatif*. Keserasian belanja dilihat dari rasio belanja langsung terhadap total belanja dinilai belum cukup baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai presentase pencapaiannya rata-rata sekitar 37,11%. Untuk belanja tidak langsung yakni sebesar 53,50%, yang memiliki nilai presentase lebih tinggi dari belanja langsung. Hal tersebut menggambarkan kurang adanya keserasian antara belanja langsung dan tidak langsung. Sebab belanja langsung memberikan pengaruh yang lebih terhadap kualitas output suatu kegiatan.

Kerangka berfikir



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif yang menggambarkan tentang keserasian keuangan daerah Kabupaten Lombok Timur khususnya mengenai belanja modal dan belanja operasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini analisa rasio keserasian dimana menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim, 2007).

Ada 2 perhitungan dalam rasio keserasian ini, yaitu : rasio belanja operasi dan rasio belanja modal. Rasio belanja operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasional. Belanja operasional merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah (Mahmudi, 2010). Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria Belanja Operasi Daerah

Kriteria Belanja Operasi	Persentase Belanja Operasi
Baik	Dibawah 40%
Cukup Baik	40% -80%
Kurang Baik	80 -100%

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

Rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20% (Mahmudi, 2010). Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria Belanja Modal Daerah

Kriteria Belanja Modal	Persentase Belanja Modal
Kurang Baik	0% - 10%
Cukup Baik	10% - 40%
Baik	Diatas 40%

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja operasi maupun rasio belanja modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja modal yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

Belanja Daerah

Berdasarkan UU Nomor 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 14, “Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berdasarkan pada anggaran kinerja (performance budget), yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik.

Tabel target dan realisasi belanja daerah kabupaten Lombok Timur Tahun 2014 - 2018 (dalam jutaan Rupiah)

Belanja Daerah			
Tahun	Target	Realisasi	%
2014	1.807.801	1.624.283	89,85
2015	2.137.980	1.938.495	90,67
2016	2.490.818	2.198.829	88,28
2017	2.590.510	2.434.255	93,97
2018	2.692.091	2.497.167	92,76
rata-rata	11.719.201	10.693.031	91,24

Sumber: BPKAD Kabupaten Lombok Timur

Berdasarkan table terlihat pada tahun 2017 realisasi belanja daerah mengalami peningkatan menjadi Rp 2.434.255.556.547,47 hal ini disebabkan karena pemerintah kabupaten lombok timur mendapat dana intensif daerah dari pemerintah pusat yakni sebesar Rp 43,251 Miliar. Pada tahun 2018 realisasi belanja daerah mengalami penurunan menjadi Rp 2.497.167.569.292,25 hal ini terjadi karena musibah gempa yang melanda Kabupaten Lombok Timur secara beruntun menjadi salah satu kondisi yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran tahun 2018.

Belanja Operasi

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 pasal 55 ayat 1, “Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek”.

Tabel Target dan Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014 – 2018 (dalam Jutaan Rupiah)

Belanja Operasi			
Tahun	Target	Realisasi	%
2014	1.391.889	1.315.051	94,47
2015	1.504.384	1.381.315	91,81
2016	1.637.648	1.479.166	90,32
2017	1.735.221	1.614.959	93,06
2018	1.878.591	1.728.993	92,03
Rata-	8.147.736	7.519.486	92,28

Rata			
------	--	--	--

Sumber: BPKAD Kabupaten Lombok Timur

Tabel realisasi belanja modal Kabupaten Lombok Timur mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 realisasi belanja modal mengalami peningkatan menjadi Rp 469.901.093.897,58 hal ini disebabkan karena pemerintah kabupaten lombok timur mendapat dana intensif daerah dari pemerintah pusat. Pada tahun 2018 realisasi belanja daerah mengalami penurunan menjadi Rp 376.735.950.185,59 hal ini terjadi karena musibah gempa yang melanda Kabupaten Lombok Timur secara beruntun menjadi salah satu kondisi yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran tahun 2018.

Belanja Modal

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 pasal 55 ayat 1, “Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi”.

Tabel Target dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014-2018 (dalam jutaan rupiah).

Belanja Modal			
Tahun	Target	Realisasi	%
2014	323.322	227.093	70,23
2015	426.147	361.282	84,77
2016	546.161	421.798	77,22
2017	493.119	469.901	95,29
2018	416.256	376.735	90,50
Rata-Rata	2.205.006	1.856.811	84,20

Sumber: BPKAD Kabupaten Lombok Timur

Pada Tabel Belanja Modal tampak bahwa realisasi belanja modal Kabupaten Lombok Timur mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 realisasi belanja modal mengalami peningkatan menjadi Rp 469.901.093.897,58 hal ini disebabkan karena pemerintah kabupaten lombok timur mendapat dana intensif daerah dari pemerintah pusat. Pada tahun 2018 realisasi belanja daerah mengalami penurunan menjadi Rp 376.735.950.185,59 hal ini terjadi karena musibah gempa yang melanda Kabupaten Lombok Timur secara beruntun menjadi salah satu kondisi yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran tahun 2018.

Rasio Keserasian

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Rasio belanja operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Hasil perhitungan rasio keserasian keuangan daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2014-2018.

Tabel Hasil Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Operasi Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014-2018 (dalam jutaan rupiah).

Tahun	Realisasi Belanja Operasi (Rp)	Total Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Rasio (%)	Keterangan
2014	1.315.051	1.624.283	80,96	Kurang Baik
2015	1.381.315	1.938.495	71,25	Cukup Baik
2016	1.479.166	2.198.829	67,27	Cukup Baik
2017	1.614.959	2.434.255	66,34	Cukup Baik
2018	1.728.993	2.497.167	69,23	Cukup Baik
Rata-Rata	7.519.486	10.693.031	70,32	Cukup Baik

Sumber: BPKAD Kabupaten Lombok Timur

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel Tabel perhitungan rasio keserasian belanja operasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur untuk tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan. Belanja daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur setiap tahunnya mengalami peningkatan. Rasio keserasian belanja operasi tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 masing-masing sebesar : 80,96%, 71,25%, 67,27%, 66,34%, 69,23% yang termasuk dalam kategori cukup baik karena berada dibawah 80%. Rata-rata nilai rasio keserasian belanja operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2014-2018 memiliki nilai rata-rata sebesar 70,32% dan termasuk dalam kriteria cukup baik, karena berada dalam skala interval 40-80%. Tingkat rasio keserasian belanja operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur yang cukup baik, terjadi karena besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya belanja pegawai untuk gaji PNS.

Hasil Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Modal Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014-2018 (dalam jutaan rupiah).

Tahun	Belanja Modal (Rp)	Total Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Rasio (%)	Keterangan
2014	227.093	1.624.283	13,98	Cukup Baik
2015	361.282	1.938.495	18,63	Cukup Baik
2016	421.798	2.198.829	19,18	Cukup Baik
2017	469.901	2.434.255	19,3	Cukup Baik
2018	376.735	2.497.167	15,08	Cukup Baik
Rata-Rata	1.856.811	10.693.031	17,36	Cukup Baik

Sumber: BPKAD Kabupaten Lombok Timur

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel Tabel perhitungan rasio keserasian belanja modal di atas nampak bahwa rasio keserasian belanja modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2014 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2018 belanja modal mengalami penurunan. Rasio keserasian belanja operasi tahun 2014, 2015, 2016, 2017, masing-masing sebesar : 13,98%, 18,63%, 19,18%, 19,30 yang termasuk dalam kategori cukup baik karena berada diatas dalam keadaan cukup baik dikarenakan proporsinya berada di atas 10%. Tetapi pada tahun 2018 rasio keserasian belanja modal mengalami penurunan menjadi 15,08%. Rata-rata tingkat rasio keserasian belanja modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2014-2018 yaitu sebesar 17,36% dan termasuk dalam kriteria cukup baik, karena berada dalam skala interval 10-40%. Hal ini berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur cukup mampu mengalokasikan belanja daerahnya untuk meningkatkan kegiatan pembangunan guna mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

Seperti yang dikemukakan oleh Musgrave (1989) bahwa porsi pengeluaran akan berubah karena terjadi perubahan jumlah pengeluaran pada bagian yang lain. Begitu pula yang terjadi pada keserasian antara belanja Modal dengan belanja operasi keuangan Kabupaten Lombok Timur.

KESIMPULAN

Berdasarkan rasio keserasian belanja operasi menunjukkan bahwa nilai rata-rata tingkat keserasian belanja operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2014-2018 sebesar 70,32% dan termasuk dalam kriteria cukup baik, karena berada dalam skala interval 40-80%. Sedangkan rasio keserasian belanja modal Pemerintah Daerah

Kabupaten Lombok Timur tahun 2014 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2018 belanja modal mengalami penurunan. Rata-rata tingkat rasio keserasian belanja modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2014-2018 yaitu sebesar 17,36% dan termasuk dalam kriteria cukup baik, karena berada dalam skala interval 10-40%. Hal ini berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur sudah mampu mengalokasikan belanja daerahnya untuk meningkatkan kegiatan pembangunan guna mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2004. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor No. 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014 – 2018. BPKAD Kabupaten Lombok Timur

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/04/163745269/jenis-jenis-belanja-daerah?page=all>

Abdal, Herabudin, Siti Saodah. 2018. Analisis Keserasian Belanja Daerah Kabupaten Garut. *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*. Vol 10 No.2 | Desember 2018: 87-9

Bird.R.M.1993. *The Cading the Fiscal Labyrint some Issues in Fiscal Decentralitation*.Nationaltax Journal.

Erlina, Omar Sakti Rambe, Rasdianto (2015). *AKuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Salemba Empat.

Halim, Abdul. 20012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat.

Khusaini, Mohammad. 2006. *Ekonomi Publik : Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*.BPFE Unibraw. Malang.

- Musgrave, A.Richard.1989. *Public Finance In Theory And Practice* .McGraw-Hill.Inc
- Martinez vazquenez, Jorge.M and McNabR. 2001. *Fiscal Desentralization, ecnpmoc growth and democratic Governance. Working Paper.October 1.41*
- Mardiasmo. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE UGM. Yogyakarta
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohammad. 2012. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta :BPFE.
- Qates,W.E. 1993. *Fiscal Decentralization and Economic Development. National Tax Journal* 46 (3) 237-243
- Word Bank. 1997b. *One line Source Book on Decentralization and Rural Development Decentralization Thematic Team, SDA*.